

Pemanfaatan Penilaian Indeks Daya Saing Daerah untuk Optimalisasi Sektor Unggulan dan Berkembang pada Aglomerasi Wilayah Kedungsepur

Zukruf Novandaya¹, Holi Bina Wijaya², M. Indra Hadi Wijaya², Hafzhi Nur Azmi¹ dan Herlina Kurniawati³

¹Pusat Pelayanan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Universitas Diponegoro

²Universitas Diponegoro

³Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Jawa Tengah

e-mail: zukrufn@gmail.com

Abstrak—Aglomerasi Wilayah Kedungsepur terdiri dari 6 daerah yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Grobogan. Daerah aglomerasi wilayah Kedungsepur memiliki karakteristik keunggulan berdasarkan sektor aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Sektor unggulan sektor ekonomi suatu wilayah mengindikasikan tren perkembangan sektor ekonomi dan progresifitas perkembangannya jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sektor unggulan ekonomi daerah tersebut akan terakumulasi menjadi kapasitas daerah dalam pengembangan internal daerah dan untuk sistem perwilayahan sekitarnya. Optimalisasi keunggulan sektor ekonomi tersebut dapat diperkuat dengan penguatan daya saing daerah secara internal, sehingga akan menciptakan nilai tambah sektor ekonomi disuatu wilayah. Daya Saing Wilayah tersebut terdiri dari Faktor Pendorong seperti Infrastruktur dan Kebijakan, Kapasitas Sumberdaya Manusia dan Tenaga Kerja, serta Kesiapan Inovasi dan Teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran daya saing dalam optimalisasi sektor unggulan daerah di Aglomerasi Wilayah Kedungsepur. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif deskriptif dengan metode Location Quotient dan Shift Share untuk menentukan sektor unggulan sektor ekonomi. Peran indeks daya saing dan inovasi daerah terhadap optimalisasi kapasitas wilayah tersebut dianalisis secara kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masing-masing wilayah memiliki keunggulan sektor ekonomi yang berbeda dan saling terkait. Untuk mengoptimalkan produk unggulan tersebut perlu adanya penguatan masing-masing wilayah khususnya dalam kapasitas inovasi dan teknologi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Faktor Pendorong lainnya seperti infrastruktur, dan kebijakan.

Kata Kunci— Daya Saing Wilayah, Kapasitas Daerah, Kedungsepur, Keunggulan Komparatif.

I. PENDAHULUAN

INDONESIA memiliki wilayah yang secara geografis kepulauan dan luas serta memiliki perbedaan karakteristik lokal menyebabkan adanya ketimpangan antar wilayah. Guna mereduksi hal tersebut maka pengembangan wilayah Indonesia selain mengadopsi sistem otonomi daerah atau penyerahan wewenang pembangunan ke daerah juga mengembangkan sistem kewilayahan dalam pengembangan nasionalnya [1]. Kewilayahan ini didukung dengan adanya konsep aglomerasi wilayah. Aglomerasi wilayah secara

pengertian merupakan suatu kesatuan wilayah dengan lokasi geografis yang berdekatan. Aglomerasi terdapat dua pengertian secara konseptual, yang pertama aglomerasi diartikan sebagai suatu proses yang secara akumulasi mobilitas yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu lingkup spasial [2]. Pengertian kedua aglomerasi merupakan suatu aktivitas yang membuat terjadinya lokalitas ekonomi yang membuat adanya konsentrasi secara spasial. Aglomerasi di wilayah pedesaan juga menunjukkan ruang antara sebagai tempat antara bagi beberapa entitas dan jaringan ekonomi dalam koeksistensi keberadaannya [3]. Aglomerasi wilayah terdiri dari aktivitas-aktivitas sosial ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Aktivitas ekonomi tersebut mendorong adanya pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dan dapat menjadi salah satu ukuran keberhasilan suatu pembangunan daerah [4]. Pertumbuhan ekonomi daerah ini tidak dapat dilepaskan dengan adanya interaksi secara kewilayahan baik sebagai suplai maupun pasar dari suatu kegiatan ekonomi. Interaksi suatu daerah terjadi karena adanya aktivitas sosial ekonomi di suatu wilayah serta karakteristik daerah secara lokal. Aktivitas dan perbedaan karakteristik sosial ekonomi tersebut akan menumbuhkan daya saing antar sektor kegiatan ekonomi dan dapat meningkatkan pertumbuhan secara ekonomi pada suatu daerah. Daya Saing ini terjadi karena adanya perbedaan keunggulan komparatif yang terjadi pada suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya berdasarkan produk sektor yang dihasilkan [5].

Menurut [6] Kemampuan daerah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan modal produktif dan sumber daya manusia yang kompeten, serta menjadi inovatif disebut dengan daya saing daerah. Aspek daya saing ekonomi makro dan mikro serta dibentuk oleh keunggulan komparatif dan kompetitif merupakan faktor yang mempengaruhi daya saing daerah [7]. Pada lingkup wilayah dalam satu negara, daya saing tidak bersifat sebagai kompetisi tetapi sebagai kapasitas daerah berperan dalam suatu wilayah. Aglomerasi wilayah memudahkan kolaborasi keunggulan komparatif dan kompetitif milik masing-masing daerah untuk meningkatkan produktivitas wilayah.

Secara ekonomi aglomerasi muncul karena preferensi untuk variasi di sisi konsumsi atau keragaman barang setengah jadi di

sisi produksi [8]. Sedangkan dampak Aglomerasi kawasan dimana pertumbuhan kawasan perkotaan dapat didorong oleh dua kekuatan berupa faktor penarik dan pendorong [9], [10], dimana menjadi faktor penarik adalah adanya permintaan tenaga kerja yang tinggi dari kegiatan perkotaan, yang dapat memberikan upah yang lebih baik dari pada kegiatan pertanian. Aglomerasi wilayah Kedungsepur terdiri dari Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Grobogan merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah yang diorientasikan sebagai percepatan pembangunan ekonomi. Hal ini ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dengan salah satu tujuannya adalah untuk mendukung nilai tambah pembangunan wilayah berdasarkan daya saing wilayah tersebut [11]. Secara peruntukan wilayah ini memang sebagai kawasan startegis industri yang berfokus di Kawasan Industri Kendal sampai Demak, serta perdagangan dan jasa yang berfokus di Kota Semarang. Namun, secara kebutuhan dan aktivitas yang terjadi juga perlu dikaji keunggulan dari tiap daerah agar mampu berperan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Keunggulan tiap wilayah tersebut perlu dioptimalkan sehingga akan membentuk suatu daya saing wilayah.

Persaingan ekonomi yang semakin bergeser menjadi lebih internasional membuat “wilayah” menjadi unit geografis penting dalam membentuk daya saing negara, maka dalam konteks kekinian daya saing daerah/wilayah merupakan perpanjangan dari teori pertumbuhan wilayah “regional growth” dimana daerah bersekutu untuk mencapai faktor kunci pembangunan wilayah yaitu peningkatan kapasitas pengetahuan, pelaku usaha dan inovasi untuk mendorong performa pasar dan penyerapan tenaga kerja [12]. Implementasi Indeks Daya Saing di Indonesia dimulai pada tahun 2018. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) ini penting diukur sebagai ukuran keberhasilan daya saing suatu daerah dibandingkan daerah lainnya. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diukur berdasarkan kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional ditetapkan terdapat 4 Aspek utama yaitu Penguat, Sumber Daya Manusia, Pasar dan Ekosistem Inovasi [13]. Dari keempat aspek tersebut dijabarkan kedalam 12 pilar dan 23 dimensi lainnya. Pada penelitian ini, keunggulan komparatif dan kompetitif suatu wilayah yang diukur berdasarkan nilai LQ dan Shift Share akan dioptimalkan melalui evaluasi yang dilakukan berdasarkan nilai Indeks Daya Saing Daerah, sehingga dapat dioptimalkan peran serta wilayah tersebut berdasarkan keunggulannya.

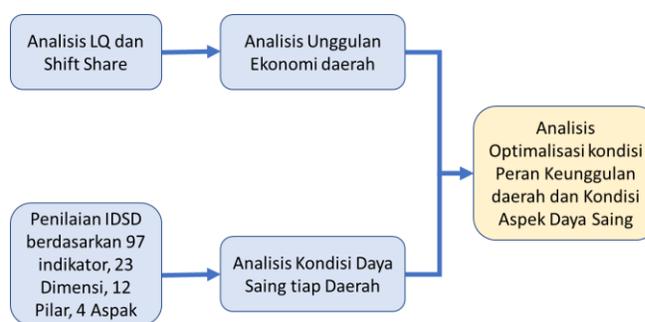
II. METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk pemanfaatan hasil penilaian Indeks Daya Saing Daerah sebagai ukuran kondisi dan daya saing suatu wilayah kabupaten/kota. Penelitian ini memiliki cakupan wilayah penelitian di Sistem Kewilayahan Kedungsepur. Secara operasional penelitian ini akan menganalisis sektor unggulan secara komparatif yang ada di daerah pada sistem kewilayahan Kedungsepur serta mengevaluasinya berdasarkan hasil penilaian Indeks Daya Saing Daerah yang telah diukur oleh BRIN pada tahun 2020. Nilai Indeks Daya Saing Daerah yang digunakan pada penelitian ini merupakan akumulasi dari nilai indikator yang dibagi menjadi 1-5 skala penilaian dengan 1 artinya kondisi

sangat tidak ideal dan 5 kondisi sangat ideal.

Metodelogi penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan metode analisis LQ dan Shift Share, hal ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor unggulan dan sektor berkembang dari masing-masing daerah di sistem kewilayahan Kedungsepur. *Location Quotient (LQ)* merupakan suatu perhitungan potensi suatu daerah karena aktivitas ekonomi menghasilkan barang-barang dan jasa untuk dipasarkan kewilayah secara internal dan kemampuan untuk menjual keluar wilayah sehingga menjadi pendapatan bagi suatu daerah [14]. Sedangkan *Shift Share* adalah analisis ekonomi regional yang diaplikasikan untuk mengetahui kecenderungan angka pertumbuhan struktur ekonomi yang terjadi [15].

Basis data yang digunakan untuk analisis LQ dan Shift ini merupakan data PDRB harga Konstan berdasarkan Lapangan usaha tahun 2016-2020. Sektor unggulan pada penelitian ini sesuai dengan tipologi klasen yaitu ketika sektor tersebut memiliki nilai $LQ > 1$ (basis) dan nilai Shift Share ≥ 0 (maju). Sedangkan sektor berkembang pada penelitian ini sesuai dengan tipologi klasen yaitu ketika sektor tersebut memiliki nilai $LQ > 1$ (basis) dan nilai Shift Share < 0 (mundur).



Gambar 1. Kerangka Metodologi Penelitian

Hasil analisis sektor unggulan dari analisis Tipologi Klasen dijadikan faktor yang dioptimalkan peranannya untuk mendukung kapasitas berperan masing-masing daerah. Optimalisasi kapasitas sektor unggulan dan sektor berkembang tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi kondisi nilai IDSD berdasarkan empat aspek utama yaitu Aspek Penguat, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pasar dan Aspek Ekosistem Inovasi [13]. Keempat aspek tersebut dapat kembali dijabarkan kedalam 11 pilar berikut:

Tabel 1. Penjabaran Pilar IDSD Kabupaten/Kota di Indonesia

Aspek	Pilar
Faktor Penguat/Enabling Environment	Infrastruktur
	Kelembagaan
	Perekonomian Daerah
Sumber Daya Manusia/Human Capital	Pendidikan dan Keterampilan
	Kesehatan
Faktor Pasar/Market	Ketenagakerjaan
	Efisiensi Pasar Produk
	Ukuran Pasar

Ekosistem Inovasi	Akses Keuangan
	Dinamika Bisnis
	Kesiapan Teknologi
	Kapasitas Inovasi

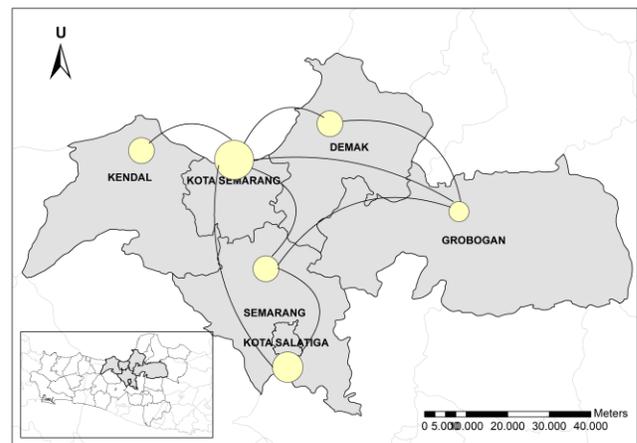
Kesebelas pilar tersebut yang akan dianalisis gapnya berdasarkan analisis kapasitas dan peran dari wilayah di Kedungsepur. Analisis deskriptif kondisi nilai Indeks Daya Saing Daerah yang telah diukur oleh BRIN dan keterkaitannya dengan peran kapasitas daerah berdasarkan sektor unggulan yang ada di masing-masing wilayah digunakan sebagai sarana rekomendasi sehingga peran daerah dapat optimal.

Peraturan perkotaan dan wilayah, kehidupan sehari-hari; dan urbanisasi saat ini telah menjadi isu; urbanisasi terbentang melalui pola dan jalur yang beraneka ragam dari pembangunan spasial yang tidak merata; dan perkotaan adalah proyek kolektif di mana potensi yang dihasilkan melalui urbanisasi disesuaikan dan diperebutkan [16]

Fenomena dalam pengembangan perkotaan dewasa ini adalah transformasi kawasan perkotaan ke kawasan pinggiran, atau disebut sebagai urbanisasi. Ketidak seimbangannya antara ketersediaan lahan dan jumlah penduduk merupakan faktor utama urbanisasi. Pemusatan aktivitas di perkotaan menjadi salah satu penyebab urbanisasi dimana menyebabkan angka permintaan lahan menjadi tinggi salah satunya untuk kegiatan permukiman [17], [18]

Peri urban adalah daerah pinggiran kota berbeda dari daerah perkotaan dan pedalaman pedesaan karena mata pencaharian pedesaan dan perkotaan yang dinamis hidup berdampingan dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam telah digantikan [19]

peri-urbanisasi di negara-negara ini dalam kaitannya dengan ketergantungannya pada pusat-pusat metropolitan, akumulasi modal dan koeksistensi dinamis mata pencaharian perkotaan dan pedesaan. Meskipun kami mengakui pertumbuhan kontribusi daerah pinggiran kota terhadap ekonomi regional, hal ini masih mengorbankan kohesi spasial, keberlanjutan regional, dan kualitas lingkungan fisik. Dikatakan bahwa konsekuensi yang tidak diinginkan ini merupakan cerminan dari lanskap kelembagaan yang terfragmentasi, khususnya di tingkat regional [20], [21].



Gambar 2. Peta Wilayah pada Sistem Kewilayahan Kedungsepur 2020

Penelitian ini akan menganalisis keterkaitan peran daerah di sistem perwilayahan Kedungsepur yang terdiri dari 2 kota dan 4 kabupaten (**Gambar 2.**) berdasarkan peraturan normatif yaitu Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang pengembangan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur serta karakteristik aktivitas ekonomi yang ada di sistem perwilayahan Kedungsepur berdasarkan analisis ekonomi *LQ* dan *Shift share*. Peran tersebut kemudian akan dikontekskan dengan kondisi Indeks Daya Saing Daerah untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dapat mendukung peran tersebut sehingga peran suatu daerah terhadap sistem perwilayahan Kedungsepur dapat optimal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis daya saing wilayah ini perlu dilakukan dengan pemetaan berdasarkan sektor unggulan dan berpotensi yang ada di suatu daerah [15]. Sektor unggulan tersebut dianalisis berdasarkan nilai PDRB dari Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan dari tahun 2015 hingga 2020 sehingga diketahui klusterisasi sektor unggulan, potensial, berkembang dan terbelakang. Berdasarkan hasil analisis perbandingan *LQ* dan *Shift Share* di Tipologi Klassen diperoleh perbedaan sektor unggulan dan potensial yang ada di daerah pada Sistem Perwilayahan Kedungsepur (Tabel 2.). Hasil tersebut menjadi justifikasi analisis peranan dari masing-masing wilayah sesuai kapasitas aktivitas dan output ekonomi makro dari masing-masing daerah.

Tabel 2. Analisis Sektor Unggulan dan Berkembang berdasarkan *LQ* dan *Shift Share* (Tipologi Klassen) kab/kota di Kedungsepur

Kab/Kota	Sektor Unggulan	Sektor Berkembang
Kota Semarang	Real Estate; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan	Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Jasa Pengadaan Air, Konstruksi; Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan

		Pergudangan; dan Administrasi Pemerintahan,
Kota Salatiga	Jasa Pendidikan; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Pengadaan Listrik dan Gas; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Industri Pengolahan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Real Estate; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan
Kabupaten Semarang	Real Estate; Jasa Pendidikan	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan;
Kabupaten Demak	Perdagangan Besar dan Eceran; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Kabupaten Kendal	Pertambangan dan Penggalian; Jasa Pendidikan; dan Jasa Lainnya	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Kabupaten Grobogan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; Jasa Lainnya	Transportasi dan Pergudangan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Berdasarkan analisis tersebut diketahui sektor unggulan dan sektor berkembang dari masing-masing daerah di sistem perwilayahan Kedungsepur. Kota Semarang sebagai pusat aktivitas wilayah memiliki sektor unggulan Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Jasa Perusahaan. Hal ini sesuai dengan perannya sebagai pusat aglomerasi penduduk dan aktivitasnya. Namun terdapat sektor-sektor jasa dan perdagangan lainnya yang sifatnya menurun secara tren sehingga berada di sektor berkembang. Sektor tersebut perlu adanya upaya untuk dapat kembali meningkatkan peranan Kota Semarang sebagai pusat wilayah. Selain itu terdapat Kota Salatiga yang menjadi sub pusat aktivitas di Kedungsepur dan memiliki fungsi sebagai kawasan perkotaan. Sebagai kawasan perkotaan, Kota Salatiga memiliki kapasitas sektor unggulan berupa Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Perusahaan;. Sektor-sektor tersebut mendefinisikan peranan Kota Salatiga dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial untuk daerah sekitarnya juga seperti Boyolali, Sragen dan Kabupaten Semarang. Sedangkan jasa-jasa lainnya berada di

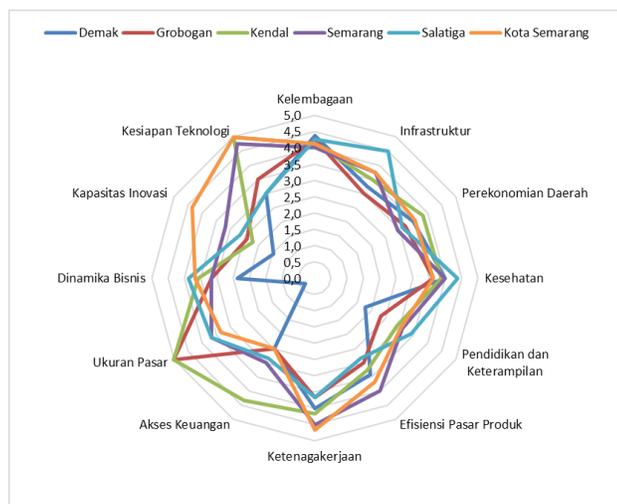
sektor berkembang seperti sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, pengo Limbah, dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Kabupaten Semarang juga menjadi kawasan sub pusat pelayanan di tingkat wilayah dengan adanya sektor unggulan berupa Real Estate; Jasa Pendidikan serta sektor berkembang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan. Hal ini juga sebagai peran Kabupaten Semarang sebagai kawasan peri urban Kota Semarang khususnya dalam penyediaan permukiman. Selain itu, kapasitas Kabupaten Semarang juga sebagai kawasan pendidikan, penyedia produk pertanian dan industri pengolahan untuk wilayah sekitarnya. Kabupaten Demak memiliki sektor unggulan berupa Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan sektor berkembang yang ada di Kabupaten Demak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini sesuai dengan peran Kabupaten Demak selain sebagai peri urban Kota Semarang juga sebagai penyuplai kebutuhan primer di perkotaan seperti produk pertanian, dan upaya perkembangan aktivitas industri dan jasa di luar Kota Semarang.

Kabupaten Kendal memiliki karakteristik sektor unggulan dan berkembang yang hampir sama dengan Kabupaten Demak. Secara peran Kabupaten Kendal ini berfungsi sebagai kawasan peri urban Kota Semarang dan sebagai pusat pelayanan wilayah Kedungsepur. Kabupaten Kendal memiliki kapasitas sektor unggulan berupa Industri Pengolahan; Pertambangan dan Penggalian; Jasa Pendidikan; dan Jasa Lainnya, serta sektor berkembang yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Masifnya perkembangan industri pengolahan di Kendal dengan adanya Kawasan Industri Kendal berdampak pada berkembangnya jasa-jasa lainnya. Namun, disamping itu peranan Kendal sebagai penghasil sektor primer seperti pertanian juga masih menjadi peran penting, meskipun secara tren menurun.

Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang secara peran sebagai kawasan sub urban untuk kawasan Kedungsepur. Kabupaten Grobogan ini memiliki sektor unggulan berupa Jasa Keuangan dan Asuransi; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya serta sektor berkembang berupa Pertanian, Transportasi dan Pergudangan; dan Administrasi Pemerintahan, Kehutanan, dan Perikanan; Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Perkembangan sektor unggulan dan berkembang di Kabupaten Grobogan ini dipengaruhi oleh signifikansi perkembangan sektor-sektor tersebut jika dibandingkan perkembangan agregat Kawasan Kedungsepur. Kabupaten Grobogan ini memiliki peranan untuk perkembangan kawasan perkotaan dan

pelayanan di Wilayah Kedungsepur serta penyuplai dalam sektor primer seperti perdagangan dan jasa.



Gambar 3. Nilai IDSD pada Sistem Kewilayahan Kedungsepur 2020

Kapasitas nilai IDSD yang ada di Sistem Kewilayahan Kedungsepur ini secara agregat memiliki nilai yang cukup baik dan menjadi nilai agregat tertinggi di Jawa Tengah setelah Sistem Kewilayahan Subosukawonosraten. Berdasarkan nilai agregat tiap daerah Kota Semarang merupakan daerah dengan nilai tertinggi di Sistem Kewilayahan Kedungsepur dengan nilai 3,89. Hal ini sesuai dengan kapasitas Kota Semarang sebagai pusat aktivitas dan pelayanan yang ada di Sistem Kewilayahan Kedungsepur dan Jawa Tengah serta Pusat Kegiatan Nasional. Setelah Kota Semarang nilai IDSD tertinggi secara berturut-turut Kabupaten Kendal (3,75), Kabupaten Semarang (3,65), Kota Salatiga (3,57), Kabupaten Grobogan (3,26) dan nilai terendah adalah Kabupaten Demak dengan nilai 2,86.

Berdasarkan kondisi umum Sistem Perwilayahan Kedungsepur ini memiliki kekuatan pada kondisi kelembagaan yang cukup baik dalam mendukung iklim usaha dan pemerintahan yang kondusif. Namun selain pilar kelembagaan terdapat disparitas yang ada di Sistem Kewilayahan Kedungsepur ini terutama pada aspek Pendidikan dan keterampilan. Kota Semarang yang memiliki peran sebagai pusat aktivitas urban dengan peran pusat perdagangan dan jasa berdasarkan analisis sebelumnya memiliki peluang untuk peningkatan kapasitasnya dengan adanya dukungan kesiapan pelaku usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Terlebih sector teknologi informasi menjadi sektor dengan tren peningkatan tertinggi di PDRB Kota Semarang (sektor unggulan). Selain itu kapasitas Kota Semarang juga didukung oleh ekosistem inovasi yang baik di Kota Semarang mulai dari regulasi, manajemen usaha serta keaktifan Kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan. Namun, perlu adanya peningkatan akses keuangan dan permodalan bagi pelaku usaha sehingga dapat menguatkan ekosistem usaha di Kota Semarang, hal ini dikarenakan masih rendahnya pertumbuhan usaha yang ada di Kota Semarang. Selain itu perlu

juga untuk meningkatkan hilirisasi produk riset untuk kepentingan komersial yang ada di Kota Semarang.

Kota Salatiga memiliki peran sebagai sub pusat di Sistem Kewilayahan Kedungsepur yang memiliki sifat perkotaan. Secara kondisi daya saing Kota Salatiga memiliki kapasitas stabilitas ekonomi daerah dan infrastruktur yang baik. Hal ini dapat menunjang kapasitas ekonomi Kota Salatiga sebagai Kawasan perkotaan dibidang Jasa Perusahaan dan Industri. Selain itu kondisi infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan yang baik mempengaruhi juga peluang peningkatan sektor unggulan yaitu dibidang jasa Kesehatan dan Pendidikan. Kesiapan masyarakat dalam digitalisasi telekomunikasi sudah baik, namun perlu adanya peningkatan kapasitas sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan iklim usaha dan kolaborasi antar stakeholder dalam penguatan inovasi daerah.

Kabupaten Semarang memiliki peran sebagai sub pusat untuk Sistem Kewilayahan Kedungsepur dengan kapasitas sektor unggulan Jasa Pendidikan dan Real Estate; serta sektor berkembang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan. Untuk menunjang peran sebagai peri urban Kota Semarang tersebut Kabupaten Semarang memiliki penyediaan elektrifikasi, dan penyediaan air minum yang sangat baik, namun perlu peningkatan dalam rasio penyediaan jalan dan koefisien ruang terbuka yang masih rendah. Hal ini diperlukan untuk mendukung optimalnya sektor real estate. Kabupaten Semarang memiliki potensi dengan tingginya rasio usia produktif yang memiliki kapasitas kerja dan partisipasi kerja yang baik. Hal ini akan mendukung ketersediaan tenaga kerja dalam upaya peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan dan kapasitas bagi wilayah sekitarnya. Namun, sebagai daerah dengan sektor berkembang dibidang pertanian besaran Nilai Tukar Petani yang masih rendah mengindikasikan masih kurang optimalnya produktivitas petani. Kabupaten Semarang juga memiliki potensi dengan iklim manajemen usaha yang baik, dan pertumbuhan perusahaan sosial yang tinggi, namun perlu peningkatan terhadap jumlah industri kecil hingga besar terutama juga yang terkait dengan startup. Kabupaten Semarang perlu adanya upaya peningkatan ekosistem inovasi dan teknologi untuk kolaborasi produk dan penelitian pengembangan dengan dunia usaha, dan perguruan tinggi. Selain itu, dukungan kapasitas badan litbang dan keuangan juga perlu ditingkatkan untuk akselerasi pengembangan inovasi dan teknologi.

Kabupaten Kendal memiliki peran sebagai sub pusat untuk Sistem Kewilayahan Kedungsepur dengan kapasitas sektor unggulan Pertambangan dan Penggalian; Jasa Pendidikan; dan Jasa Lainnya, serta sektor berkembang utama yaitu Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kabupaten Kendal berperan sebagai sub urban Kota Semarang memiliki kapasitas ketersediaan tenaga kerja produktif yang juga dapat mendukung perkembangan industri pengolahan. Selain itu Kabupaten Kendal memiliki kekuatan regulasi dalam menunjang kemudahan berusaha, namun hal ini belum dapat mempercepat pertumbuhan industri kecil, menengah hingga besar terutama di pertumbuhan industri besar dan startup masih sangat rendah. Selain itu manajemen produk di industri kecil

dan menengah belum baik. Kabupaten Kendal perlu adanya upaya peningkatan ekosistem inovasi dan teknologi untuk kolaborasi produk dan penelitian pengembangan dengan dunia usaha, dan perguruan tinggi. Selain itu, dukungan kapasitas badan litbang dan keuangan juga perlu ditingkatkan untuk akselerasi pengembangan inovasi dan teknologi. Dari sisi pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) yang ada di Kabupaten Kendal ini sudah baik yang mengindikasikan produktivitas petani sudah baik karena memiliki nilai pada skala 5.

Kabupaten Demak juga merupakan Kawasan sub pusat bagi Sistem Kewilayahan Kedungsepur yang memiliki kapasitas sektor unggulan berupa Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sedangkan sektor berkembangnya adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kabupaten Demak memiliki kondisi ketenagakerjaan yang baik secara produktivitas dan ketersediaannya, hal ini akan menunjang perannya sebagai daerah peri urban Kota Semarang dan meningkatkan sektor-sektor ekonomi unggulan serta berkembang. Kabupaten Demak juga memiliki potensi dengan iklim manajemen usaha yang baik di industri besar namun pada industri kecil menengah masih rendah. Selain itu, masih perlu peningkatan terhadap jumlah industri kecil hingga besar terutama juga yang terkait dengan startup dan perusahaan sosial. Upaya ini perlu dilakukan sebagai upaya penciptaan ekosistem dinamika bisnis yang berkelanjutan. Kabupaten Demak perlu adanya upaya peningkatan ekosistem inovasi dan teknologi untuk kolaborasi produk dan penelitian pengembangan dengan dunia usaha, dan perguruan tinggi. Selain itu, dukungan kapasitas badan litbang dan keuangan juga perlu ditingkatkan untuk akselerasi pengembangan inovasi dan teknologi. Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang memiliki peran sebagai sub urban untuk Sistem Kewilayahan Kedungsepur dengan kapasitas sektor unggulan utama adalah Pertambangan dan Penggalan serta sektor berkembang utama adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Bahkan sektor pertanian merupakan sektor dengan contributor tinggi di Kabupaten Grobogan. Hal ini juga ditunjang dengan Nilai Tukar Petani Sangat Tinggi, yang menunjukkan produktivitas petani yang tinggi secara ekonomi. Selain itu Kabupaten Grobogan memiliki kekuatan regulasi dalam menunjang kemudahan berusaha, namun hal ini belum dapat mempercepat pertumbuhan industri kecil, menengah hingga besar terutama di pertumbuhan industri besar, perusahaan sosial dan startup masih sangat rendah. Selain itu manajemen produk di industri kecil dan menengah masih memiliki nilai rendah. Kabupaten Grobogan perlu adanya upaya peningkatan ekosistem inovasi dan teknologi untuk kolaborasi produk dan penelitian pengembangan dengan dunia usaha, dan perguruan tinggi. Selain itu, dukungan kapasitas badan litbang dan keuangan juga perlu ditingkatkan untuk akselerasi pengembangan inovasi dan teknologi.

IV. KESIMPULAN/RINGKASAN

Setiap daerah memiliki peran dan kapasitas daerah masing masing berdasarkan kondisi keunggulan komparatif yang ada di

suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis ekonomi makro, kondisi ekonomi setiap daerah memiliki sektor unggulan dan berkembang masing-masing. Perbedaan kapasitas inilah yang akan menimbulkan kapasitas berperan dari masing-masing wilayah di Sistem Kewilayahan Kedungsepur. Selain dari kondisi ekonomi makro berdasarkan PDRB, peranan wilayah juga ditentukan dari keunggulan lokasi dan karakteristiknya sehingga terdapat wilayah pusat, dan sub pusat. Pada Sistem kewilayah Kedungsepur, Kota Semarang merupakan daerah Pusat, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Kabupaten Grobogan, dan Kota Salatiga sebagai Kawasan sub pusat.

Berdasarkan kapasitas dan peran tersebut maka perlu dioptimalkan kapasitasnya sehingga dapat berperan secara optimal di Sistem Kewilayahan Kedungsepur atau wilayah lebih tinggi. Dukungan Aspek Penguat, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pasar dan Aspek Ekosistem Inovasi menjadi dasar untuk optimalisasi peran dan fungsi masing-masing daerah. Namun kondisi secara umum Sistem Kewilayahan Kedungsepur telah memiliki kapasitas kelembagaan yang baik, namun masih perlu peningkatan pada aspek ekosistem usaha, inovasi dan kualitas ketenagakerjaan. Hal ini perlu dilakukan sebagai factor penguat dari daya saing masing-masing daerah..

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan pemanfaatan hasil kajian IDSD Provinsi Jawa Tengah yang bekerjasama dengan P5 Undip Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro atas dukungan guna penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sjafrizal, *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang, Sumatera Barat: Boduose Media, 2017.
- [2] T. Head, K., & Mayer, "The empirics of agglomeration and trade," *Handbook of Regional and Urban Economics*, vol. 4, pp. 2609–2669, 2003, doi: [https://doi.org/10.1016/S1574-0080\(04\)80016-6](https://doi.org/10.1016/S1574-0080(04)80016-6).
- [3] N. Phelps, *Interplaces An Economic Geography of the Inter-urban and International Economies*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- [4] E. J. Mangilaleng, D. Rotinsulu, and W. Rompas, "Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 15, no. 04, pp. 193–205, 2015.
- [5] S. Tumengung, *Gagasan dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Terpadu (Kawasan Timur Indonesia)*. Jakarta: Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Dirjen Cipta Karya Departemen PU, 1996.
- [6] S. Cvetanović, M. Filipović, M. Nikolić, and D. Belović, "Endogenous growth theory and regional development policy," *Spatium*, vol. 1, no. 34, pp. 10–17, 2015, doi: 10.2298/SPAT1534010C.
- [7] D. Soebagyo, T. Triyono, and Y. T. Cahyono, "Regional Competitiveness and Its Implications for Development," *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, vol. 14, no. 2, p. 160, 2015, doi: 10.23917/jep.v14i2.138.
- [8] J. F. Fujita, M., & Thisse, "Economics of Agglomeration *," vol. 378, pp. 339–378, 1996.
- [9] R. Jedwab, L. Christiaensen, and M. Gindelsky, "Rural Push , Urban Pull and ... Urban Push ? New Historical Evidence from Developing Countries *," no. January, 2014.
- [10] M. P. Todaro, "A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries," *The American Economic Review*, vol. 59, no. 1, pp. 138–148, 1969.

- [11] Sekretariat Presiden, *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2019*. 2019.
- [12] R. Huggins, H. Izushi, D. Prokop, and P. Thompson, "Regional competitiveness , economic growth and stages of development *," vol. 32, pp. 6–11, 2014.
- [13] BRIN, *Pedoman Pemetaan Inovasi dan Daya Saing*. Jakarta: BRIN RI, 2020.
- [14] T. Widodo, *Perencanaan Pembangunan; Aplikasi Komputer (Era Otonomi 6 Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.
- [15] Moh. Khusaini, "A Shift-share Analysis on Regional Competitiveness - A Case of Banyuwangi District, East Java, Indonesia," *Procedia Soc Behav Sci*, vol. 211, pp. 738–744, 2015, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.097.
- [16] Y. Octifanny, "The History of Urbanization in Java Island: Path to Contemporary Urbanization," *Tataloka*, vol. 22, no. 4, pp. 474–485, 2020, doi: 10.14710/tataloka.22.4.474-485.
- [17] S. N. Rukmana and M. Shofwan, "Fenomena Urbanisasi: Transformasi spasial di Kawasan Pinggiran Kabupaten Sidoarjo," *Tataloka*, vol. 22, no. 3, pp. 393–399, 2020, doi: 10.14710/tataloka.22.3.393-399.
- [18] A. G. Aguilár and P. M. Ward, "Globalization, regional development, and mega-city expansion in Latin America: Analyzing Mexico City's peri-urban sub urban," *Cities*, vol. 20, no. 1, pp. 3–21, 2003, doi: 10.1016/S0264-2751(02)00092-6.
- [19] T. G. Mezgebo and C. Porter, "From rural to urban, but not through migration: Household livelihood responses to urban reclassification in northern Ethiopia," *Journal of African Economies*, vol. 29, no. 2, pp. 173–191, 2020, doi: 10.1093/jae/ejz020.
- [20] D. Hudalah, H. Winarso, and J. Woltjer, "Peri-urbanisation in East Asia: A new challenge for planning?," *International Development Planning Review*, vol. 29, 2007.
- [21] T. Talitha, T. Firman, and D. Hudalah, "Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: a regional development perspective," *Territory, Politics, Governance*, vol. 8, no. 5, pp. 690–708, 2020, doi: 10.1080/21622671.2019.1601595.